

METAFORA ZAKAT DAN SHARI'AH ENTERPRISE THEORY SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM MEMBENTUK AKUNTANSI SYARI'AH

Iwan Triyuwono*)

Abstrak

Wacana akuntansi syari'ah termasuk masih infant. Konsep-konsep filosofis dalam konteks bisnis, ekonomi, etika, masyarakat, dan agama telah dibicarakan. Namun, untuk pengembangan yang lebih konkrit diperlukan derivasi dari konsep-konsep tersebut di atas. Untuk itu, makalah ini bertujuan untuk mendiskusikan konsep metafora zakat dan shari'ah enterprise theory yang merupakan bentuk lebih konkrit dari konsep filosofis akuntansi syari'ah.

Dengan pendekatan deskripsi-kualitatif-normatif, makalah ini mencoba memformulasikan konsep shari'ah enterprise theory. Konsep ini diturunkan dari konsep filosofis "metafora amanah" yang kemudian diturunkan lagi menjadi "metafora zakat."

Dari hasil analisis dapat diformulasikan bahwa shari'ah enterprise theory berorientasi pada pemberian informasi pada stakeholders dan natural environment sebagai wujud pertanggungjawaban pada Tuhan, manusia, dan lingkungan alam. Stakeholders di sini dibedakan dua golongan, yaitu: direct stakeholders yang memberikan kontribusi langsung pada perusahaan (seperti: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, dan lain-lainnya) dan indirect stakeholders yang tidak memberikan kontribusi pada perusahaan (seperti: fakir, miskin, dan lain-lainnya).

Keywords: metafora amanah, metafora zakat, shari'ah enterprise theory, direct stakeholders, dan indirect stakeholders.

PENGANTAR

Wacana Akuntansi Syari'ah mulai lahir di Indonesia sejak 1997 (Harahap 1997; Triyuwono 1997; 2000a; 2000b; lihat juga Gambling and Karim 1991; Baydoun and Willett 1994). Lahinya wacana ini memberikan kontribusi dalam perbendaharaan kajian tentang akuntansi khususnya di Indonesia. Paling tidak kajian ini "meleburkan" dinding pembatas antara ilmu pengetahuan (akuntansi) dan agama.

Akuntansi syari'ah sedang mencari bentuk, sehingga apa yang dipraktikkan di bank syari'ah atau di *baitul mal wa tarwii* (lihat Widodo dkk. 1999; AAOIFI 1998) sebetulnya masih banyak berwujud akuntansi

*) Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi Brawijaya Malang.

konvensional yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme, seperti misalnya yang terkandung dalam konsep *entity theory*, *accounting numbers*, *accounting income*, dan lain-lainnya (Triyuwono 2000a, xxiii-xxxvi).

Triyuwono (1997; 2000a; 2000b) telah mengajukan konsep “metafora amanah” - yang kemudian diturunkan menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat” (*zakat metaphorised organisational reality*) atau, singkatnya, “metafora zakat.”. Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit (*profit-oriented*), tetapi berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*). Konsekuensi dari ini adalah bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan model manajemen amanah.

Model manajemen ini memberikan implikasi pada akuntansi. Implikasi yang sangat mendasar adalah bahwa bentuk konstruksi akuntansi syari'ah akan berdasarkan pada konsep nilai-nilai zakat (Triyuwono 1997; 2000a; 2000b; lihat juga Setiabudi 1999; Slamet 2001). “Metafora zakat” telah melahirkan dua aliran pemikiran dalam memformat bentuk akuntansi syari'ah. Pemikiran pertama lebih cenderung untuk tetap menggunakan *entity theory* (Gambling and Karim 1991). Sedangkan pemikiran kedua lebih cenderung menggunakan *enterprise theory* (Baydoun and Willett 1994; Harahap 1997; Triyuwono 1997; 2000b).

Makalah ini pada dasarnya mengembangkan pemikiran kedua yang menggunakan *enterprise theory*. Hal ini dilakukan, karena pemikiran pertama masih lebih dekat dengan pemikiran modern yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme dan maskulinisme (Triyuwono 2000a, ix-xxxvi; Hines 1992; lihat juga Ghofar 1999). Ini merupakan konsekuensi dari pandangan modernisme yang meletakkan nilai-nilai maskulin dalam posisi sentral dan sebaliknya memarjinalkan nilai-nilai feminin. Dengan pandangan ini akuntansi modern menghasilkan informasi akuntansi yang bias (maskulin) dan dapat menimbulkan destruksi terhadap kehidupan manusia dan alam (Triyuwono 2000a; Ghofar 1999; dan Hines 1992). Kemaskulinan akuntansi modern (konvensional) terletak pada nilai egoisme yang tertanam pada konsep entitas, *income (for stockholders)*, pengakuan *private costs* (dengan menegasikan *social costs*), dan lain-lainnya (Triyuwono 2000a; Ghofar 1999; dan Hines 1992).

Tujuan utama dari makalah ini adalah mencari konsep *enterprise theory* yang berbasis pada nilai syari'ah. Hal ini dilakukan karena konsep yang ditawarkan oleh Baydoun and Willett (1994) masih belum

sempurna. Pembahasan dimulai dengan konsep metafora amanah, metafora zakat, kemudian konsep *shari'ah enterprise theory*.

METAFORA AMANAH

Metafora Amanah sebagai kiasan untuk melihat, memahami, dan mengembangkan organisasi bisnis (dan sosial) telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk organisasi yang lebih humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal (Triyuwono 1997; 2000a). Metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi.

Bentuk konkrit dari metafora ini di dalam organisasi bisnis adalah “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat” (*zakat metaphorised organisational reality*). Realitas, menurut metafora ini, berpandangan bahwa *profit-oriented* atau *stockholders-oriented* bukan orientasi yang tepat bagi perusahaan yang berbasis nilai syari'ah, tetapi sebaliknya menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*) (Triyuwono 1997, 25), berorientasi pada pelestarian alam (*natural environment*) dan berorientasi pada *stakeholders*.

Orientasi zakat berarti bahwa perusahaan akan berusaha untuk mencapai realisasi zakat (baik dalam arti materi maupun nilai) yang optimum. Ini berarti bahwa *net profit* bukan lagi ukuran keberhasilan manajemen perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja materi dan spiritual (etika) (lihat Triyuwono 1997, 25). Kemudian *environment and stakeholders-oriented* memiliki implikasi bahwa akuntansi syari'ah mempunyai kepedulian untuk mendistribusikan “kesejahteraan” (nilai tambah) yang berhasil diciptakannya kepada alam dan *stakeholders*.

Perusahaan modern pada umumnya berorientasi pada *profit* dengan menggunakan teori entitas (*entity theory*). Teori ini berangkat dari sebuah fakta bahwa perusahaan adalah entitas yang terpisah dari pemiliknya (Kam 1990, 305). Teori ini juga menekankan diri pada *income* dengan alasan bahwa: (1) pemegang saham (pemilik) umumnya memiliki kepentingan atas besarnya “penghasilan” dari dana yang diinvestasikannya dan (2) perusahaan berusaha untuk tetap eksis atau *survive* dengan cara perolehan laba (Kam 1990, 508).

Metafora amanah ini sebetulnya diturunkan dari sebuah “aksioma” yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu berfungsi sebagai *Khalifatullah fil Ardh* (wakil Tuhan di bumi) sebagaimana firman berikut ini:

Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi." (QS. 2:30).

Dialah yang menjadikan kami khalifah-khalifah di
muka bumi (QS. 35:39).

Dengan fungsi ini, manusia mengemban "amanah" yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan Pemberi Amanah (Triyuwono 1997, 19). Adapun "amanah" yang dimaksud di sini adalah "mengelola bumi secara bertanggung-jawab dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah" (Rahardjo 1995, 47).

Mengelola bumi dapat diartikan menciptakan kesejahteraan bagi semua manusia dan alam semesta berdasarkan nilai-nilai yang diridhai oleh Sang Pemberi Amanah. Secara normatif, misi *Khalifatullah fil Ardh* ini diturunkan dari ayat al-Qur'an:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. 21:107).

Singkatnya, manusia memiliki tugas mulia, yaitu: menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan non-materi) bagi seluruh manusia dan alam semesta. Untuk mempermudah tugas ini, manusia dapat menciptakan "organisasi" (baik organisasi bisnis maupun organisasi sosial) untuk digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut (Triyuwono 2000a).

Oleh karena itu, sangat wajar jika "metafora amanah" digunakan dalam mendesain bentuk, struktur, dan manajemen organisasi dalam rangka menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan.

REALITAS ORGANISASI YANG DIMETAFORAKAN DENGAN ZAKAT

Dalam bentuk yang lebih operasional, metafora "amanah" bisa diturunkan menjadi metafora "zakat," atau realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat (*a zakat metaphorised organisational reality*). Ini artinya adalah bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak lagi *profit-oriented*, atau *stockholders-oriented*, tetapi *zakat-oriented* dan *environment and stakeholders-oriented* (Triyuwono 2000a). Dengan

orientasi zakat ini, perusahaan berusaha untuk mencapai "angka"¹ pembayaran zakat yang optimum. Dengan demikian, laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat, *environment*, dan *stakeholders* menjadi kriteria ukuran kinerja perusahaan.

Penggunaan metafora zakat untuk menciptakan realitas organisasi mempunyai beberapa makna. *Pertama*, terdapat transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. *Kedua*, karena yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main (*rules of game*) yang ditetapkan dalam Syari'ah (atau tunduk pada etika bisnis). *Ketiga*, zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial (*altruistic*) mementingkan lebih dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Karakter egoistik menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai Syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan altruistik mempunyai arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya ini tercermin dalam zakat itu sendiri. *Keempat*, zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, serta pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. *Kelima*, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci (ukhrawi). Ia (zakat), sebagai jembatan, memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu berkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di Akhirat (Triyuwono 2000b; 1997).

Secara ideal, organisasi bisnis hendaknya dapat menciptakan realitas organisasinya berdasarkan pada metafora zakat. Implikasi dari hal ini adalah bahwa semua perangkat organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar merefleksikan zakat sebagai metafora. Ini adalah sebuah bentuk transformasi. Transformasi ini tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, *stockholders*, karyawan, dan

¹ Pengertian angka dan zakat di sini tidak perlu diartikan secara sempit, karena *zakat-oriented* itu sendiri adalah metafora yang mempunyai makna dan konsekuensi yang luas dan komprehensif.

masyarakat sekelilingnya, tetapi juga perangkat informasi, dalam hal ini adalah bentuk akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang bersangkutan (Triyuwono 2000a; 2000b; 1997). Namun demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya yang dapat mempengaruhi bentuk akuntansi. Faktor-faktor lain seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, juga mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap bentuk akuntansi (Mathews and Perera 1993; Francis 1990; Hines 1989; Morgan 1988). Ini juga adalah sebuah bukti bahwa akuntansi adalah sebuah entitas informasi yang tidak bebas nilai.

SHARI'AH ENTERPRISE THEORY

Entitas bisnis yang berorientasi pada *profit* dan *stockholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* (atau sebaliknya), lalu bagaimana bila orientasi tersebut berubah? Dengan menggunakan “metafora amanah” atau “metafora zakat” jelas orientasi tersebut berubah. *Entity theory* tidak kompatibel dengan metafora ini. *Entity theory* memiliki nilai individual dan *profit oriented*, sedangkan “metafora zakat” memiliki karakter yang berbeda. Metafora zakat bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat.

Beberapa kajian telah dilakukan di bidang akuntansi syari'ah baik dalam tataran konseptual maupun praktis. Namun kajian tersebut belum masuk pada konsep teoritis akuntansi syari'ah. Kalaupun ada, seperti: Triyuwono (1997), Harahap (1997), Adnan (1999), dan Taheri (2000), hanya sebatas merekomendasikan penggunaan konsep teoritis tertentu tanpa diikuti oleh pembahasan yang lebih rinci.

Harahap (1997, 154-155) misalnya telah mencoba untuk mengajukan pemikiran bahwa:

Kalau ada pernyataan mengenai postulat, konsep, dan prinsip akuntansi Islam itu maka saat ini yang bisa saya jawab adalah masalah ini tidak semudah yang dibayangkan. Tentunya untuk merumuskan ini perlu pengkajian multi dimensi. Yang jelas literatur sampai saat ini belum bisa menjelaskannya. Tapi dari postulat, konsep, dan prinsip yang ada dapat kita saring mana yang sejalan dengan konsep Islam. Misalnya konsep mana

yang dipakai dari ketiga konsep: *proprietary theory*, *entity theory*, dan *enterprise theory*? Maka akan saya jawab *enterprise theory* karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban... *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat.

Argumentasi Harahap (1997) sangat beralasan, karena akuntansi syari'ah itu sendiri lebih memiliki corak sosial dan berorientasi pada kepentingan *stakeholders* daripada *stockholders*. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Adnan (1999) dan Triyuwono (2000b) yang pada intinya merekomendasikan *enterprise theory* sebagai konsep teoritis akuntansi syari'ah. Triyuwono mengutarakan:

Akuntansi syari'ah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan (2000b, 24).

Dengan mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* adalah *enterprise theory*. Hal ini demikian, karena *enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat). Dengan kata lain, bahwa sebuah perusahaan itu bisa eksis, karena perusahaan tersebut berinteraksi dengan "masyarakat"nya sebagai konsekuensi "kontrak sosial" (*social contract*) yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat.

Meskipun beberapa penulis telah mengajukan *enterprise theory* sebagai konsep teoritis akuntansi syari'ah, namun hal ini belum bisa dijadikan sebuah justifikasi bahwa *enterprise theory* telah menjadi konsep teoritis akuntansi syari'ah. Menurut Slamet (2001, 224-5) dibutuhkan pembahasan yang mendalam untuk mencapai taraf seperti itu di samping belum ada kesepakatan di antara para pakar. Hal tersebut bisa dilihat, misalnya, dari pendapat Tahery (2000) yang lebih merekomendasikan *proprietary theory*. Tahery (2000, 5) beralasan bahwa yang mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada Allah

adalah manusia, bukan institusi atau entitas. Bagi Tahery (2000) pemilik (*proprietor*) merupakan pusat dari segala kepentingan. Namun sayangnya argumen yang diutarakan oleh Tahery (2000) tersebut terasa kontradiktif dengan apa yang ditekankan sebelumnya bahwa akuntansi syari'ah memfokuskan informasi akuntansi pada masyarakat dan pemerintah yang diarahkan pada penggunaan sumberdaya secara efisien untuk pencapaian tujuan sosial. Sehingga jika menggunakan dasar *proprietary theory* untuk tujuan tersebut akan menjadi tidak relevan, karena *proprietary theory* diletakkan dan dirancang atas dasar pemahaman kapitalisme (lihat Slamet 2001).

Slamet (2001, 226-33) mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syari'ah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung-jawaban. Slamet (2001, 235-6) juga berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syari'ah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono (2000a, 19), yaitu: humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal.

Namun demikian *enterprise theory* masih bersifat "duniawi" dan tidak memiliki konsep Tauhid (Slamet 2001, 265). Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai dengan syari'ah, maka perlu diinternalisasikan nilai Tauhid. Karena dengan konsep dan nilai ini kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggung-jawaban. Tanpa menginternalisasikan konsep tauhid ini maka proses pembentukan *shari'ah enterprise theory* tentu tidak dapat dilanjutkan.

Dalam *shari'ah enterprise theory*, lebih lanjut Slamet (2001, 266-8) menjelaskan, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shari'ah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung-jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (lihat QS. 2: 254 dan 267).

Tentu sangat beralasan jika penggunaan sumberdaya tersebut baik secara individual dan kolektif dibatasi, karena memang pada hakikatnya *stakeholders* hanya memiliki hak guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan Allah, tetapi ditujukan pada

manusia yang mempunyai hak atas sumberdaya tersebut. Difirmankan oleh Allah:

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta'atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat (An-Nuur: 56).

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apakah saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan pada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui (Al Baqarah: 215).

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka yang tidak dapat (berusaha) dibumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta (Al-Baqarah: 273).

Ayat-ayat tersebut, menurut Slamet (2001, 267), membawa implikasi penting dalam penetapan konsep-konsep dalam *shari'ah enterprise theory*. Yang utama adalah bahwa ayat-ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta kita sebenarnya tersimpan hak orang lain, seperti: hak para fakir-miskin, anak-anak terlantar, *ibnu sabil* dan lain-lainnya seperti terlihat pada ayat berikut ini:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. 9:60).

Dengan demikian dalam pandangan *shari'ah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*)

tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shari'ah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan (*skill*).

Penikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shari'ah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shari'ah enterprise theory* akan membawa kemashlahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat (yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet 2001, 268).

Dari penjelasan di atas kita dapat memperoleh sebuah gambaran yang jelas tentang konsep pertanggungjawaban yang dibawa oleh *shari'ah enterprise theory*. Pada prinsipnya *shari'ah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada ummat manusia dan lingkungan alam (lihat Triyuwono 1997). Konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban *enterprise theory*, namun lebih dari itu sebagai hasil dari premis yang dipakai oleh *shari'ah enterprise theory* yang memiliki karakter transedental dan teleologikal (lihat Triyuwono 2000a). Dalam pandangan *shari'ah enterprise theory*, *stakeholders* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di buka bumi ini secara adil (Slamet 2001, 268).

Shari'ah enterprise theory menyajikan *Value-added Statement* (Laporan Nilai Tambah) sebagai salah satu laporan keuangannya.

Laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah (*value-added*) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu (lihat juga Slamet 2001):

- (1) Pihak yang Terkait Langsung dengan Bisnis Perusahaan (*Direct Participants*) yang terdiri dari: Pemegang Saham, Manajemen, Karyawan, Kreditur, Pemasok, Pemerintah, dan lain-lainnya dan
- (2) Pihak yang Tidak Terkait Langsung dengan Bisnis Perusahaan (*Indirect Participants*), yang terdiri dari: masyarakat *mustahiq* (penerima zakat, infaq, dan shadaqah) dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

Dari *Value-added Statement* pengguna laporan keuangan akan mengetahui dengan jelas kepada siapa nilai tambah tersebut telah didistribusikan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh *stakeholders* (khususnya *direct participants*) akan terlihat di *Balance Sheet* (Neraca). Dengan kata lain, pada dasarnya Neraca ini memberikan informasi tentang kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan kontribusi yang diberikan oleh *direct participants*, seperti: pemegang saham, kreditur, dan pihak lainnya.

Informasi yang disajikan di Laporan Nilai Tambah dan Neraca juga bermanfaat untuk menetapkan besarnya zakat yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Zakat ini juga menunjukkan distribusi yang diberikan kepada *mustahiq* (salah satu kelompok dari *Indirect Participants*).

Dalam kaitannya dengan penentuan besarnya zakat, maka pengukuran nilai dengan menggunakan *current cost accounting* menjadi lebih tepat (Gambling dan Karim 1991; Baydoun dan Willet 1994) bila dibandingkan dengan *historical cost accounting*. Bagi Baydoun dan Willet (1994), nilai pasar sekarang (*current market value*) sebuah aktiva tidak selalu berasal dari transaksi biaya historik tunggal dari perusahaan yang memiliki aktiva, tetapi ia berdasarkan pada rata-rata nilai dari suatu set transaksi yang terjadi jika perusahaan membeli atau menjual aktiva itu sekarang. Mereka juga menekankan bahwa penggunaan metode *current value accounting* sebagai perluasan akuntabilitas perusahaan ke *domain* sosial. Ini dipertegas dengan pernyataan mereka yang mengatakan bahwa nilai yang ditambahkan perusahaan pada perekonomian dilakukan melalui (interaksi) tenaga kerja (pada

masa lalu dan sekarang) dan nilai ini harus didistribusikan secara adil sesuai dengan yang ditetapkan dalam syari'ah.

Atas dasar ini kemudian mereka mendisain *Value-added Statement*, disamping *Cash Flow Statement* dan *Current Value Balance Sheet*, sebagai unsur laporan keuangan. *Value-added Statement* pada dasarnya adalah semacam Laporan Rugi-Laba (dalam pengertian akuntansi konvensional). Berbeda dengan Laporan Rugi-Laba, laporan ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya (*beneficiaries*). Laporan ini memberikan informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan akan didistribusikan.

Karena konsep ini mempunyai kepedulian yang lebih luas daripada konsep lainnya dalam distribusi *income*. *Value-added income*, dalam hal ini, adalah harga pasar dari produk (atau jasa) yang dijual perusahaan dikurangi dengan harga produk (atau jasa) yang diperoleh perusahaan. Bagi Hendriksen *value-added income* adalah:

the total pie that can be divided among the various contributors of factors inputs to the enterprise in the production of goods and services (1982, 163).

Jadi *value-added income* merupakan kue yang sedemikian rupa harus didistribusikan kepada "masyarakat." Pengertian masyarakat dan distribusi *income* di sini jelas mempunyai makna yang berbeda dengan konsep *income* yang lain.

Pengertian *income* dalam konsep *enterprise net income* adalah kelebihan pendapatan (*revenues*) atas beban (*expenses*) dan juga laba (*gains*) dan rugi (*losses*). *Income* dalam pengertian ini diperuntukkan kepada pemilik (*stockholders*), *bondholders*, dan pemerintah (Kam 1990). Unsur-unsur seperti beban bunga yang didistribusikan kepada *bondholders* dan dividen yang didistribusikan kepada pemilik adalah bersifat *financial*, dan laba bersih bersifat *operating*. Sedangkan pajak penghasilan bukan bersifat *financial* ataupun *operating*. Baydoun dan Willet (1994) beranggapan bahwa konsep yang paling dekat dengan syari'ah adalah *value-added concept of income*.

Pemikiran yang disampaikan oleh dan Baydoun dan Willet (1994) (lihat juga Gambling dan Karim 1991) jelas memberikan nuansa baru pengembangan akuntansi. Pemikiran dan kontribusi mereka dapat digunakan sebagai "bahan baku" dalam mengkonstruksi

akuntansi syari'ah. Dianggap bahan baku karena kontribusi mereka masih bersifat parsial. Dengan kata lain, perhatian mereka masih terbatas pada distribusi kesejahteraan kepada *stakeholders*, belum memperhatikan aspek kesejahteraan untuk lingkungan alam. Pada sisi yang lain, mereka juga belum membicarakan konsep teoritis akuntansi syari'ah yang sebetulnya merupakan aspek yang sangat fundamental dalam membangun praktik akuntansi yang berdasarkan nilai syari'ah.

PENUTUP

Beberapa pokok pemikiran di atas pada dasarnya merupakan wacana yang sedang dilakukan untuk mengembangkan akuntansi syari'ah. Konsep "metafora amanah," "metafora zakat," dan *shari'ah enterprise theory* masih membuka diri untuk dinilai dan dikritisi. Konsep-konsep ini sebetulnya diturunkan dari sebuah premis ilahiyat yang mengatakan bahwa manusia adalah *khalifatullah fil ardh*. Premis ini mempunyai konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam konteks manajemen perusahaan dan akuntansi yang dipraktikkan.

"Metafora amanah" mengindikasikan bahwa perusahaan merupakan instrumen yang digunakan oleh manusia untuk mengekspresikan kekhalifahan manusia di bumi, yaitu: menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi *stakeholders* (manusia) dan lingkungan alam. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa semua yang dilakukan oleh manajemen harus berdasarkan pada etika syari'a'h (etika bisnis).

Konsekuensi lain dari "metafora amanah" adalah "metafora zakat." Metafora berkait erat dengan konsep (tujuan) perusahaan yang tidak lagi berorientasi pada laba, tetapi berorientasi pada zakat. Namun demikian, pengertian "berorientasi pada zakat" ini tidak bisa diartikan secara sederhana dalam arti mencapai jumlah angka zakat yang optimum. Tetapi pengertian yang lebih fundamental adalah menggunakan konsep nilai zakat sebagai dasar operasi manajemen dan konstruksi akuntansi syari'ah.

Wujud konkrit "metafora zakat" dalam konteks akuntansi terlihat pada konsep *Shari'ah enterprise theory*. Konsep ini juga tidak terlepas dari nilai *khalifatullah fil ardh* yang mendasarinya. Ini terlihat pada kepeduliannya terhadap *stakeholders* dan lingkungan alam sebagai manifestasi dari tugas khalifah untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh *stakeholders* (manusia) dan alam. Pada *Value-added statement*, yang merupakan salah satu unsur laporan keuangan *Shari'ah enterprise theory*, memberikan informasi yang lebih

transparan tentang pendistribusian nilai tambah yang diciptakan perusahaan, termasuk pada *direct participants* dan *indirect participants*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar and Michael Gaffikin. 1996. The shari'ah, Islamic banks, and accounting concepts and practices. *Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective International Conference I*, Sydney, Australia.
- Adnan. M. Akhyar. 1999. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan. *Seminar Nasional Strategi Manajemen Keuangan Syari'ah*, diselenggarakan di Malang oleh Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam FE Unibraw dan Bank Indonesia.
- Baydoun, N and Roger Willett. 1994. Islamic accounting theory. *The AAANZ Annual Conference*.
- Francis, Jere R. 1990. After virtue? accounting as a moral and discursive practice. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 3 (3): 5-17.
- Gambling, Trevor and Rifaat Ahmed Abdel Karim. 1991. *Business and Accounting Ethics in Islam*. London: Mansell.
- Ghofar, Abdul. 1999. Analisa implikasi pemikiran dan penelitian akuntansi dari paradigma mainstream Barat dan paradigma Islam dalam kerangka analisis konsep Tao. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi – Universitas Brawijaya.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1996. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hines, D. Ruth. 1992. *Accounting Filling The Negative Space*. *Accounting, Organization, and Society* 17 (3/4): 313-41.
- Kam, Vernon. 1990. *Accounting Theory*. Second edition. New York: John Wiley & Sons.
- Mathews, MR and MHB Perera. 1993. *Accounting Theory and Development*. Melbourne: Thomas Nelson Australia.

- Morgan, Gareth. 1988. Accounting as reality construction: towards a new epistemology for accounting practice. *Accounting, Organizations and Society* 13 (5): 477-85.
- Rahardjo, Dawam. 1995. Khalifah. *Ulumul Qur'an*. Vol. VI(1): 40-7.
- Setiabudi, Hendry Y. 2000. Tinjauan Komparatif-interpretif Ekuitas sebagai Konsep Kepemilikan dalam Akar Epistemologi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Slamet, M. 2001. *Enterprise Theory* dalam Konstruksi Akuntansi Syari'ah (Studi Teoritis pada Konsep Akuntansi Syari'ah). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi - Universitas Brawijaya.
- Tahery, Mohammad R. 2000. *The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Standards –Setting*, http://www.Islamic_Finance.com
- Triyuwono, Iwan. 1997. "Akuntansi Syari'ah" dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 1. No. 1: 1-46.
- Triyuwono, Iwan. 2000a. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LKIS.
- Triyuwono, Iwan. 2000b. Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai keadilan dalam Format Metafora Amanah, *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, Vol 4. No1: 1-34.